

# Politik Transaksional, DCT, dan Potret Gagalnya Kaderisasi Parpol!

**PERHELATAN** Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 memang baru akan digelar April 2014. Tetapi atmosfer politiknya sudah gegap gempita. Partai politik sebagai kontestan, beramai-ramai telah bersiap di garis start. Bahkan sudah ramai pula memajang media sosialisasi, termasuk blusukan meminjam gaya sosialisasi yang dipopulerkan oleh Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Langkah permulaan itu ditandai dengan menyerahkan daftar calon sementara (DCS) selanjutnya memfinalkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif, mulai dari caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi sampai DPR/MPR. Termasuk caleg untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga mulai menggeliat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga tingkatan, sebagai penyelenggara pemilu juga mulai sibuk memverifikasi berkas para caleg. Sembari mempersiapkan tahapan pemilu yang lain, di tengah maraknya pro-kontra terhadap beberapa kebijakan KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2014.

Tapi baiklah, barangkali semua proses dan pemak-pemik itu secara politis merupakan proses alamiah menjelang pelaksanaan pemilu. Namun, sebagai pemilih, ada hal yang lebih penting harus kita cermati sekaligus kita kritisi bersama agar tak salah pilih sekaligus menjadi pemilih cerdas. Apa itu? Mari kita berangkat dari pertanyaan sederhana, apakah penetapan DCT bebas dari transaksi politik? Nah ini yang penting, DCT adalah muara awal pertarungan pelaksanaan pemilu legislatif April 2014!

Seperti kita ketahui bersama perubahan penetapan calon anggota legislatif, dari nomor urut ke suara terbanyak, jelas



Oleh

Hendra Alfani SSos MI Kom

Dosen FISIP UNBARA dan Direktur Eksekutif Lingkar Prakarsa Institute

sekali menurunkan kuantitas dan kualitas kaderisasi di tubuh partai politik, khususnya bagi parpol peserta pemilu. Siapa saja bisa menjadi caleg, tanpa harus bertahun-tahun membangun karir politik dari bawah di tubuh parpol yang dipilihnya sebagai saluran kepentingan politiknya. Termasuk bebas memilih daerah pemilihan (dapil), syaratnya mudah: asal punya uang yang cukup!

Seorang pengurus teras atau bahkan Ketua Umum Parpol sekalipun, bisa tak berarti apa-apa dalam pemilu. Seseorang yang tak pernah "berurusan" dengan parpol selama hidupnya, dalam semalam dia bisa menjadi caleg tanpa harus mengikuti ketentuan AD dan ART Parpol. Ketika ia memiliki dana yang cukup untuk "membeli" tiket pencalegan. Dus memiliki peluang yang sama, bahkan lebih berpeluang, jika dibandingkan Ketum Parpol untuk dapat terpilih menjadi senator.

Mantan pejabat militer, pensiunan pejabat birokrasi, pengusaha, artis, mantan koruptor, bahkan preman sekalipun

bisa menjadi caleg dan masuk DCT dengan mudahnya. Sisi integritas, kapabilitas kepemimpinan; kalah oleh uang dan populisme. Sementara kader-kader parpol yang militan membesarkan partainya, membangun integritas, seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Karier politik mereka seperti menabrak tembok tebal. Demi kepentingan politik jangka pendek, uang dan populisme menjadi "argumentasi" dominan dalam upaya mendongkrak suara parpol.

Apa yang terjadi? Politik transaksional merajai penetapan DCT. Semua bisa diatur, asal transaksi politiknya cocok, pas dan menguntungkan. Akibatnya apa? Oleh karena "semakin tidak jelasnya" proses ataupun mekanisme rekrutmen caleg, kita sebagai pemilih cenderung disuguhi "badut-badut" politik.

Begitu terpilih mereka tidak signifikan memikirkan kepentingan rakyat. Contoh sederhananya mereka cepat melupakan rakyat pemilihnya. Baru ingat lagi dan tebar pesona dengan "konstituennya" ketika musim pemilu tiba. Tapi ketika pemilu usai, mereka hilang bak di telan bumi, tak karuan rimbanya.

Fenomena ini hendaknya segera dipikirkan oleh parpol untuk dievaluasi dan dirubah ke titik yang lebih jelas. Parpol (ke depan) sebagai salah satu saluran kepentingan politik, harus kembali menyusun dan menyiapkan proses rekrutmen serta kaderisasi anggota/kadernya secara lebih akuntabel. Sudah saatnya parpol merubah orientasi yang untuk tidak lagi tunduk pada pola politik transaksional-prosedural semata. Seroang kader parpol harus lahir dengan proses waktu yang tepat dan cukup. Tidak boleh prematur! Tidak boleh instan!

Demokrasi kita akan mengalami kemunduran jika parpol sebagai salah satu pilar demokrasi tidak segera merevitalisasi mekanisme rekrutmen kadernya. Proses rekrutmen kader harus terpola, berbasis kepentingan jangka panjang parpol sebagai saluran utama memperjuangkan kepentingan rakyat (konstituen) secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Sebab parpol bukan milik dinasti politik, bukan milik keluarga, bukan milik golongan tertentu, bukan pula jembatan bagi orang-orang kaya untuk meraih manisnya madu kekuasaan. Parpol adalah milik rakyat!

Menjadi wakil rakyat tidak cukup hanya memiliki popularitas. Integritas, rekam jejak, kapabilitas dan akuntabilitas, semestinya menjadi prasyarat yang wajib dikedepankan parpol. Jelas sekali fenomena tersebut, semakin menunjukkan bahwa proses politik di Indonesia saat ini belum menunjukkan perbaikan. Dan politik kepartaian kita kian kuat diarahkan pada proses-proses yang sifatnya transaksional dan prosedural belaka.

Barangkali catatan kecil ini patut dicermati bersama. Mandegnya kaderisasi dalam tubuh parpol, ke depan, akan menjadi kerikil-kerikil tajam yang dapat saja menciderai-melukai perjalanan panjang "kaki-kaki" demokrasi kita.

Barangkali juga bukan mimpi, ketika parpol berada di jalur yang benar (*on the track*), akan menjadi saluran yang tak lagi "dicaci-maki" atau disulit dipercaya oleh rakyat, utamanya dalam mewujudkan bangunan demokrasi substansial yang didasarkan pada integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan berkelanjutan dalam upaya membangun negeri menggapai kesejahteraan dan kemandirian untuk seluruh rakyat. Semoga! (\*)